

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dalam konteks Madrasah Aliyah Negeri (MAN) diemban oleh kepala sekolah, memegang peran krusial dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai pusat informasi, PPID bertanggung jawab menyediakan akses bagi warga sekolah terhadap data dan informasi relevan seperti kurikulum dan kebijakan sekolah, demi terciptanya lingkungan pendidikan yang transparan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2008) serta Peraturan Komisi Informasi dan Dokumentasi Republik Indonesia tahun 2021(Peraturan Komisi Informasi dan Dokumentasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2021), setiap badan publik, termasuk madrasah, diwajibkan menyediakan akses informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pendidikan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam madrasah memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam dunia pendidikan tidak hanya mendukung kebijakan publik, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai pengelolaan sekolah. Undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi yang dikelola oleh lembaga publik, termasuk di sektor pendidikan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki pengelolaan sumber daya, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

PPID di lembaga pendidikan, termasuk Madrasah Aliyah, memiliki beberapa tugas penting, seperti mengumpulkan, mengolah, dan mendokumentasikan data akademik dan administrasi sekolah, menyediakan informasi untuk kepentingan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Fungsi PPID juga meliputi penyusunan dan pembaruan dokumen penting seperti kurikulum, nilai siswa, dan laporan kegiatan sekolah. Namun, di lapangan, sering kali ditemukan tantangan dalam pengelolaan PPID yang berdampak pada efektivitas kinerja lembaga pendidikan tersebut.

Pendidikan, sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan bangsa, memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas,

kritis, dan partisipatif. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan menjadi suatu keharusan. Madrasah Aliyah Negeri (MAN), sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar kuat dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada siswa, orang tua, dan masyarakat.

Dalam hal ini, Rogers (Rogers 1983, 26) mengatakan bahwa Organisasi adalah sistem stabil yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama mencapai tujuan bersama melalui hierarki pangkat dan pembagian tenaga kerja. Organisasi adalah diciptakan untuk menangani tugas-tugas rutin dan untuk memberikan stabilitas pada hubungan manusia. Sekolah sebagai tempat keberadaan berbagai inovasi dalam organisasi, maka PPID adalah sebuah inovasi dalam keterbukaan informasi publik. Sekolah sebagai salah satu lembaga formal dan lembaga publik serta merupakan sebuah organisasi, perlu mempertahankan keberadaannya dengan sebuah inovasi dalam organisasi.

Sebagai bagian dari tata kelola madrasah, PPID di MAN 2 Pesisir Selatan memiliki tugas utama dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi pendidikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kepala madrasah, yang juga berperan sebagai PPID, bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Keterbukaan ini tidak hanya menjadi sarana transparansi, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam,

keterbukaan informasi menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi karena berkaitan dengan amanah dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi ini tidak hanya sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pentingnya transparansi dan pengelolaan informasi dalam Islam juga ditegaskan melalui ajaran Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:283):

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan pentingnya menjaga kejujuran, termasuk dalam memberikan informasi yang relevan dan diperlukan. Menyembunyikan informasi yang menjadi hak masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan Allah. Dalam

pengelolaan lembaga pendidikan, prinsip ini mengisyaratkan pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat (Katsir 2004, 100–110).

MAN 2 Pesisir Selatan sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Pesisir Selatan berupaya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Fungsi PPID yang dijalankan oleh kepala sekolah dapat bervariasi antara satu Sekolah dengan Sekolah lainnya. Di MAN 2 Pesisir Selatan, yang terletak di wilayah pesisir, terdapat potensi perbedaan dalam bagaimana fungsi PPID dijalankan. Secara teoritis, warga sekolah seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler, perkembangan akademik, atau kebijakan sekolah. Namun, terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara harapan tersebut dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi PPID yang dijalankan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di MAN 2 Pesisir Selatan. Berdasarkan Observasi, hasil pengamatan sementara pada bulan Juli sampai Oktober 2024 yang dilakukan di MAN 2 Pesisir Selatan, ditemukan bahwa tugas pokok dan fungsi PPID sebenarnya telah ada dan tertuang dalam kebijakan madrasah. Namun, dalam pelaksanaannya, program PPID belum mencakup keseluruhan aspek informasi pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. peneliti melakukan pengamatan awal di MAN 2 Pesisir Selatan untuk mendapatkan gambaran awal tentang

kondisi keterbukaan informasi. Saat memasuki lingkungan madrasah, peneliti melihat papan pengumuman yang dipenuhi kertas-kertas pengumuman, namun tampak kurang terorganisir. Ketika peneliti mencoba mencari informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler saat itu, tidak ada daftar lengkap yang tersedia, dan beberapa siswa yang ditanyakan tentang informasi di sekolah tersebut tampak bingung. Saat jam istirahat, peneliti melihat beberapa siswa berkumpul di depan ruang PPID, namun tidak ada petugas yang melayani. Pengamatan ini menimbulkan asumsi bahwa terdapat potensi kesenjangan antara idealisme keterbukaan informasi dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan pengamatan awal dan pemahaman tentang konteks lembaga pendidikan, peneliti berasumsi bahwa fungsi dan program-program PPID yang dijalankan di MAN 2 Pesisir Selatan mungkin memiliki variasi dalam hal cakupan, kualitas, dan efektivitas. Peneliti menduga bahwa program sosialisasi informasi mungkin tidak menjangkau semua siswa, atau sistem informasi yang ada mungkin sulit diakses oleh sebagian warga sekolah. Asumsi ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana variasi program PPID mempengaruhi akses informasi bagi warga sekolah, dan bagaimana program-program tersebut dapat ditingkatkan agar lebih efektif.

Keterbukaan informasi dalam lingkungan madrasah sebenarnya memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam membangun transparansi tetapi juga dalam meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, orang tua dapat lebih terlibat dalam perkembangan akademik anak-anak mereka, guru dapat

lebih memahami kebijakan madrasah, dan siswa dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi pendidikan.

Penelitian mengenai implementasi PPID di lingkungan madrasah masih jarang dilakukan, karena sebagian besar kajian lebih berfokus pada keterbukaan informasi di sektor pemerintahan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan (Rahmawati D 2022). Penelitian lainnya juga menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi PPID di sekolah adalah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai hak akses informasi serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi (Wijaya 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi PPID di MAN 2 Pesisir Selatan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang Berfokus pada fungsi PPID di MAN 2 Pesisir Selatan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran PPID dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan madrasah, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan judul "Fungsi PPID dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di MAN 2 Pesisir Selatan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui berbagai masalah yang muncul terkait Fungsi PPID Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di MAN 2 Pesisir Selatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan fungsi PPID sudah ada
2. Program PPID belum keseluruhan terjalan
3. Stakeholder yang menggunakan pelayanan PPID masih sedikit
4. Sarana dan Prasarana pendukung belum terpenuhi
5. Rutinitas kegiatan masih rendah
6. Kurangnya pemahaman tentang PPID

C. Fokus Penelitian

Dari uraian identifikasi masalah di atas dapat diambil fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan Fungsi PPID dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di MAN 2 Pesisir Selatan

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Program PPID di MAN 2 Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana Fungsi dan Sistem Pelaksanaan PPID terhadap keterbukaan informasi publik di MAN 2 Pesisir Selatan ?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat PPID di MAN 2 Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Program PPID di MAN 2 Pesisir Selatan
2. Untuk Mengetahui Fungsi dan Sistem Pelaksanaan PPID di MAN 2 Pesisir Selatan
3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat PPID di MAN 2 Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi di MAN 2 Pesisir Selatan
2. Manfaat Praktis: Dapat menjadi masukan bagi MAN 2 Pesisir Selatan atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam Peran Pejabat Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan permasalahan terhadap judul di atas, maka penulis perlu memberikan batasan istilah yang ada dalam judul yaitu:

1. Fungsi PPID

Menurut Penulis Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik di MAN 2 Pesisir Selatan Merujuk pada peran PPID dalam mengelola, menyediakan, dan mengawasi informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Fungsinya meliputi pengelolaan informasi dengan mendokumentasikan data kegiatan dan administrasi sekolah, pengembangan sistem informasi untuk penyebarluasan informasi, menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh siswa, orang tua, serta masyarakat, pengaturan akses informasi sesuai dengan ketentuan keterbukaan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Penulis Keterbukaan informasi publik di MAN 2 Pesisir Selatan Merujuk pada sejauh mana informasi yang dikelola oleh PPID dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses, mekanisme pengelolaan serta pengarsipan dokumen, serta efektifitas sosialisasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik di lingkungan madrasah.